

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengembangan Wilayah Perdesaan

Ilmu Wilayah ialah suatu disiplin ilmu yang berkaitan dengan kajian secara hati-hati dan bertahap tentang masalah-masalah sosial wilayah atau dimensi ruang, dengan menggunakan berbagai kombinasi penelitian analitis dan empiri yang lebih menekankan pengertian wilayah sebagai wilayah fungsional. (Saragih, 2015)

Konsep nomenklatur wilayah di Indonesia seperti wilayah kawasan, daerah, regional, area, ruang dan istilah lainnya banyak digunakan dan saling dapat dipertukarkan pengertiannya. Meski demikian masing-masing istilah memiliki bobot penekanan pemahaman yang berbeda. Istilah Wilayah, kawasan dan daerah secara umum dapat disebut wilayah atau region (Rustiadi et al. 2009).

Saragih (2015 : 31) dalam Glasson (1977) menjelaskan bahwa konsep wilayah dibagi menjadi: wilayah homogen, wilayah sistem/ fungsional (interpendensi antara bagian-bagian), dan wilayah perencanaan (koheresi atau kesatuan keputusan-keputusan ekonomi). Wilayah nodal dipandang sebagai salah satu bentuk wilayah sistem, sementara dalam konsep wilayah perencanaan.

Teori pengembangan wilayah klasik terdiri dari teori lokasi dan teori pusat pertumbuhan, akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya lebih dikenal dengan teori agropolitan. Pengembangan wilayah merupakan upaya mengawinkan secara harmonis sumber daya alam, manusia, teknologi dengan memperhitungkan daya tampung lingkungan itu sendiri. Konsep pengembangan wilayah dimaksudkan untuk memperkecil kesenjangan pertumbuhan dan ketimpangan kesejahteraan antar wilayah. Menurut Dirjen Penataan Ruang (2003), prinsip-prinsip dasar pengembangan wilayah yaitu :

1. Sebagai Growth Centre, pengembangan wilayah tidak hanya bersifat internal wilayah, tetapi harus diperhatikan sebaran atau pengaruh (Spread

Effect) pertumbuhan yang dapat ditimbulkan bagi wilayah sekitarnya, bahkan secara nasional.

2. Pengembangan wilayah memerlukan upaya kerja sama pengembangan antar daerah dan menjadi persyaratan utama bagi keberhasilan pengembangan wilayah.

3. Pola pengembangan wilayah bersifat integral yang merupakan integrasi dari daerah- daerah yang tercakup dalam wilayah melalui pendekatan kesetaraan.

4. Dalam pengembangan wilayah, mekanisme pasar harus juga menjadi prasyarat bagi perencanaan pengembangan kawasan.

Pengembangan wilayah merupakan upaya pemberdayaan stakeholders di suatu wilayah dalam memanfaatkan sumber daya alam dengan teknologi untuk memberi nilai tambah atas apa yang dimiliki oleh wilayah administratif atau wilayah fungsional. Teori pengembangan wilayah klasik terdiri dari teori lokasi dan teori pusat pertumbuhan

(Mahi, 2016: 186) menjelaskan bahwa dalam pengembangan wilayah perdesaan, diupayakan pendekatan yang terpadu, antara lain melalui pengelompokan wilayah perdesaan berdasarkan tingkat perkembangannya, yaitu menurut desa cepat berkembang, desa potensial berkembang, dan desa tertinggal. Dengan cepat berkembang pada umumnya adalah desa yang mempunyai akses yang relatif tinggi ke wilayah perkotaan, masyarakatnya mulai heterogen, dan kegiatan ekonominya tidak tergantung kepada sektor pertanian saja tetapi mulai menunjukkan adanya diversifikasi kegiatan ekonomi ke arah non- pertanian.

Desa potensial berkembang adalah yang akses ke wilayah perkotaan terbatas, masyarakatnya masih bergantung kepada sektor pertanian atau pertambangan, diversifikasi kegiatan ekonominya masih terbatas, serta penduduknya masih homogen. Desa tertinggal adalah wilayah perdesaan yang mempunyai keterbatasan aksesibilitas sumber daya alam, keterbatasan sumber daya manusia, dan keterbatasan aksesibilitas ke pusat- pusat kegiatan

ekonomi dan masyarakat banyak yang masih berada di bawah garis kemiskinan.

Secara umum, pengembangan wilayah perdesaan bertujuan untuk memajukan wilayah perdesaan dan masyarakatnya, mendukung swasembada pangan, meningkatkan produksi bahan pangan, penyediaan prasarana dan sarana dasar kepada masyarakat, penyediaan bahan baku industri, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan wilayah perdesaan, dan mengembangkan hubungan wilayah perdesaan dan wilayah perkotaan yang saling menunjang dan saling menguntungkan.

Sasaran pokok pengembangan wilayah perdesaan yaitu tercapainya kondisi ekonomi rakyat di perdesaan yang kuat, mampu tumbuh secara mandiri dan berkelanjutan, tercapainya keterkaitan perekonomian di perdesaan dan perkotaan, terwujudnya masyarakat perdesaan yang sejahtera dan teratasinya masalah kemiskinan di perdesaan.

Untuk mewujudkan sasaran pengembangan wilayah perdesaan, dikembangkan kebijaksanaan pengembangan wilayah perdesaan yang meliputi upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja di perdesaan, meningkatkan kemampuan produksi masyarakat, mengembangkan prasarana dan sarana di perdesaan, melembagakan pendekatan pengembangan wilayah/wilayah terpadu dan memperkuat lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan desa.

2.2 Definisi Desa dan Perdesaan

2.2.1 Pengertian Desa

Kajian mengenai desa dan segala problematika sosial, budaya, ekonomi dan berbagai perspektif lainnya, sudah banyak di ulas oleh para ahli sosiologi, terutama bila dilihat dalam perspektif geografi dan karakteristik kehidupan masyarakatnya, oleh sebab itu secara sederhana dapat kita awali dengan suatu pemahaman bahwa sebenarnya desa itu adalah hasil perpaduan antara berbagai kelompok kegiatan manusia dengan lingkungannya. Secara lebih formal desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana pendapat tokoh sosiologi yaitu Ferdinand Tonnies pengertian desa adalah tempat tinggal suatu masyarakat yang bersifat “*gemeinschaft*” yaitu saling terikat oleh perasaan dan persatuan yang masih erat (Masri, 2014 : 1) dalam (Selo Soemardjan dan Soelaeman Sumardi, 1965). Namun pengertian menurut para ahli dapat dilihat dalam rangkuman tulisan Masri, (2014 : 1) dalam Suriyani (2013) dalam bukunya sosiologi perdesaan, antara lain .

Sutardjo Kartohadikusuma; desa adalah sebagai suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat “ Pemerintahan sendiri”.

Paul H. Landis, desa adalah sebagai wilayah yang penduduknya kurang dari 2500 jiwa. Dengan ciri- ciri sebagai berikut :

- 1) Mempunyai pengaruh hidup yang saling kenal- mengenal antara ribuan jiwa
- 2) Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukaan terhadap kebiasaan
- 3) Desa mempunyai ikatan sosial yang relatif lebih kuat
- 4) Menurut S.D. Misra, desa adalah suatu kumpulan tempat tinggal dan kumpulan daerah pertanian dengan batas- batas tertentu yang luasnya antara 50-1.000 are.
- 5) Menurut William Ogburn dan MF Nimkoff, desa adalah kesatuan organisasi kehidupan sosial di dalam daerah terbatas.
- 6) Menurut UU No. 22 Tahun 1999, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal- usul dan adat- istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.
- 7) Dalam kasus sosiologi, desa mendukung kompleksitas yang saling berkaitan satu sama lain diantara unsur- unsurnya, yang sebenarnya Desa masih dianggap sebagai standar dan pemeliharaan kehidupan bermasyarakat dan kebudayaan asli seperti tolong- menolong, persaudaraan, gotong- royong, kepribadian dalam berpakaian, adat-

istiadat, kesenian, kehidupan moral dan lain- lain yang mempunyai ciri yang jelas.

Dalam buku interaksi desa dan kota oleh R. Bintarto (1983) bahwa apapun pengertian desa, yang pasti memiliki unsur- unsur, pertama daerah, yang terdiri dari tanah yang produktif beserta penggunaannya, termasuk juga unsur lokasi, luas dan batas yang merupakan lingkungan geografis tersebut. Kedua, penduduk yakni hal yang meliputi jumlah pertambahan, kepadatan, persebaran dan mata pencaharian penduduk desa setempat. Dan ketiga, tata kehidupan, dalam hal ini tata pola dan sistem kehidupan pergaulan dengan ikatan- ikatan sosial masyarakat desa.

2.2.2 Tipologi Desa dari perkembangan masyarakat

Suriyani (2013: 21) Jika dilihat dari perkembangan desa, maka setiap desa memperlihatkan ciri- cirinya tersendiri pada setiap tipe, yang oleh (Dirjen PMD Departemen Dalam Negeri 1972) dikemukakan sebagai berikut:

a. Desa Tradisional (Pra Desa) Tipe desa semacam ini kebanyakan kita jumpai pada masyarakat suku- suku terasing, dimana seluruh kehidupan masyarakatnya termasuk teknologi bercocok tanam, cara- cara pemeliharaan kesehatan, cara- cara memasak makanan dan sebagainya masih sangat tergantung pada pemberian alam sekeliling mereka.

b. Desa Swadaya Desa ini memiliki kondisi yang relatif statis tradisional, dalam arti masyarakatnya sangat tergantung pada keterampilan dan kemampuan pimpinannya. Kehidupan masyarakat disini sangat bergantung pada faktor- faktor alam yang belum di olah dan dimanfaatkan secara baik. Susunan kelas dalam masyarakat masih bersifat vertikal dan statis dan kedudukan seseorang dinilai dari keturunan dan luas kepemilikan tanah.

c. Desa Swakarya (Desa Peralihan) Keadaan desa ini sudah mulai disentuh oleh anasir- anasir dari luar berupa adanya pembaharuan yang sudah mulai dirasakan oleh anggota masyarakat. Benih- benih demokrasi dalam pembangunan sudah mulai tumbuh atau sudah tidak lagi bergantung pada pimpinan saja. Karya dan jasa serta keterampilan mulai menjadi tolak ukur

dalam penilaian, oleh anggota masyarakat dan tidak pada faktor keturunan serta luas pemilikan lahan. Mobilitas sosial, baik itu dalam bentuk yang vertikal maupun horizontal sudah mulai ada.

d. Desa Swasembada Masyarakatnya sudah maju, dengan sudah mulai mengenal mekanisasi pertanian dan teknologi ilmiah telah mulai digunakan, selalu berubah- ubah sesuai dengan perkembangan . Unsur partisipasi masyarakat sudah efektif dan norma- norma sosial selalu dihubungkan dengan kemampuan dan keterampilan seseorang.

e. Desa Pancasila Desa semacam ini merupakan tipe ideal yang dicita- citakan bersama yaitu tercapainya masyarakat adil dan makmur.

2.2.3 Pengertian Perdesaan

Kawasan perdesaan di definisikan sebagai wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Meskipun pendekatan peraturan umumnya menggunakan pendekatan administratif, pengertian dalam undang-undang tersebut merujuk pada definisi secara fungsional, sehingga, dalam lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum sendiri, dikenal istilah perkotaan kabupaten meskipun bentuk struktur pemerintahannya menggunakan “desa”.

Cakrawijaya, Riyanto, & Nuroji (2014 : 3) dalam Suhardjo (2008) dalam beberapa dekade terakhir mulai terjadi perubahan perubahan definisi kawasan perdesaan. Hal tersebut dikarenakan mulai berubahnya tipologi kawasan perdesaan dan pertumbuhan kawasan perdesaan dalam beberapa waktu terakhir, sehingga paradigma baru dalam memahami kawasan perdesaan memandang kawasan yang harus didominasi oleh pertanian.

Maka berdasarkan beberapa latar belakang tersebut dilakukan penyesuaian terhadap kawasan perdesaan sebagai berikut:

a. Dalam batasan administratif, kawasan perdesaan dapat diartikan sebagai suatu kesatuan wilayah administratif yang telah ditetapkan secara hukum.

b. Dalam pendekatan fungsional, kawasan perdesaan dapat diartikan sebagai suatu kesatuan wilayah fungsional yang memiliki ciri fisik dan sosial budaya tertentu dengan kegiatan ekonomi pertanian dan/atau pemanfaatan serta pengelolaan sumber daya alam, sehingga dalam definisi ini, kawasan sub-urban atau fringe area dengan ciri fisik perkotaan bukan dianggap sebagai kawasan perdesaan.

2.3 Agribisnis

2.3.1 Pengertian Agribisnis

Mardiana (2018 : 18) Agribisnis merupakan istilah yang telah lama dikenal di Indonesia. Istilah “agribisnis” diserap dari bahasa Inggris: agribusiness, yang merupakan portmanteau dari agriculture (pertanian) dan business (bisnis). Istilah ini pertama kali dipopulerkan oleh David, J.H. dan R.A. Goldberg (1975) dalam Darmansyah (2012), yang didefinisikan sebagai berikut, *agribusiness is the sum total of all operation, involved in the manufacture and distribution of farm supplies, productions on the farm, processing and distribution of farm commodities and items made from them.*

Menurut hemat penulis, agribisnis lebih tepat didefinisikan sebagai suatu aktivitas bisnis berbasis pertanian beserta faktor-faktor pendukungnya. Inti (core) pertanian adalah aspek budidaya (tanaman, ternak, ikan), sementara faktor-faktor pendukungnya meliputi:

- a. Faktor hulu yaitu aspek pengadaan sarana produksi pertanian (saprota).
- b. Faktor hilir yaitu aspek pengolahan hasil pertanian, dan pemasaran hasil pertanian.
- c. Kelembagaan penunjang yaitu aspek perbankan pertanian, koperasi pertanian, dan kelembagaan jasa-jasa pertanian lainnya.

Oleh karena itu agribisnis merupakan aktivitas bisnis yang sangat luas sekali cakupannya. Jika diperinci sedikitnya ada tujuh aktivitas bisnis yang termasuk dalam cakupan agribisnis, dimana satu aktivitas dengan aktivitas lainnya mempunyai saling keterkaitan. Ketujuh aktivitas agribisnis tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pembuatan sarana produksi pertanian, seperti bibit, benih, pupuk, racun hama dan penyakit, alat dan mesin pertanian. Pelaku aktivitas ini antara lain pengusaha tani, perusahaan pertanian, dan lembaga pemerintah.
- b. Pemasaran sarana produksi pertanian. Pelaku aktivitas ini yaitu pengusaha kios saprotan, perusahaan penyalur, koperasi, dan lembaga pemerintah.
- c. Produksi usahatani yang memproduksi produk pertanian primer seperti bahan pangan, hortikultura, daging, telur, susu dan ikan. Pelaku aktivitas ini yaitu pengusaha tani, perusahaan pertanian, perkebunan, dan lembaga pemerintah.
- d. Pengolahan produk pertanian yang memproduksi produk pertanian sekunder seperti keripik singkong, emping melinjo, mie, sari buah, ikan kemasan, susu kemasan, daging olahan dan lain-lain. Pelaku aktivitas ini antara lain yaitu perajin kecil, pengusaha agroindustri, perusahaan pertanian, perkebunan, lembaga pemerintah, dan koperasi.
- e. Pemasaran produk pertanian primer. Pelaku aktivitas ini antara lain yaitu tengkulak, pedagang besar, koperasi pertanian, perusahaan pertanian, perkebunan, dan lembaga pemerintah.
- f. Pemasaran produk pertanian sekunder. Pelaku aktivitas ini antara lain yaitu pedagang, pengusaha toko, koperasi, perusahaan, dan lembaga pemerintah.
- g. Pembiayaan pertanian, seperti bank, koperasi, LKM (Lembaga Keuangan Mikro).

2.4 Pembangunan Pertanian

Pembangunan pertanian mengandung aspek mikro, makro, dan global. Aspek mikro pembangunan pertanian diharapkan sebagai proses mewujudkan kesejahteraan masyarakat tani melalui pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usaha taninya. Aspek makro, pembangunan pertanian diharapkan dapat menyediakan pangan bagi masyarakat dan menyediakan input bagi kegiatan sosial ekonomi masyarakat secara berkesinambungan. Sedangkan dari aspek global pembangunan pertanian diharapkan dapat menghasilkan devisa negara dengan tetap menjaga stabilitas pangan dan kebutuhan produk

pertanian lain di dalam negeri tanpa harus mengurangi kesejahteraan rill masyarakat tani.

Pembangunan pertanian ditujukan terutama bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani dan keluarganya. Berbagai upaya ditujukan untuk meningkatkan pendapatan petani. Sebagian besar petani Indonesia adalah petani berlahan sempit, buruh tani, ataupun petani subsistem. Bagi petani yang masih memiliki ciri subsistem, maksimisasi pendapatan (keuntungan usahatani) sering bukan tujuan, sebaliknya tujuannya adalah meminimalkan resiko, baik resiko produksi maupun konsumsi. Kebijakan tentang inisiatif harga belum efektif dalam memengaruhi keputusan petani yang memiliki sifat subsistem. (Satria, Rustiadi, & M. Purnomo, 2011).

Pembangunan pertanian sebaiknya dibangun melalui pendekatan sistem agrobisnis. Pendekatan agrobisnis ini menempatkan kompleksitas sistem pertanian sebagai titik tolak pembangunan sehingga keseluruhan dimensi dan cakupan pembangunan pertanian melalui pendekatan agrobisnis ditempuh melalui pengembangan secara serentak on farm agribusiness sub-system dan off farm agribusiness sub-system. Pengembangan on farm agribusiness sub-system meliputi, pengadaan sarana produksi pertanian dan pengembangan budidaya pertanian. Pengembangan off farm agribusiness sub-system meliputi, pengelolaan paska panen, pengelolaan hasil budidaya pertanian, peningkatan mutu dan standarisasi produk pertanian, pengemasan (agroindustri) dan pemasaran

2.5 Lembaga Ekonomi Pertanian dan Perdesaan

Pembangunan pertanian dan perdesaan pada dasarnya berupa peningkatan dan perbaikan dalam tiga aspek berikut:

1. Sumber daya
2. Teknologi
3. Kelembagaan

Lembaga dapat merupakan yang nyata dan spesifik atau merupakan suatu yang diffuse dan bersifat umum yang memiliki struktur organisasi. Suatu

lembaga tidak akan terus eksis tanpa adanya manfaat yang muncul, baik manfaat sosial, ekonomi, politik, ataupun manfaat etikal. Kelembagaan di tingkat petani dan pedesaan (lokal) memiliki berbagai peran penting dalam pembangunan ekonomi. Institusi lokal biasanya lebih mampu mengadaptasi program dan aktivitas untuk disesuaikan dengan berbagai keadaan yang terdapat di daerah pedesaan sehingga sumberdaya manusia dan material yang langka dapat dimanfaatkan dengan sebaik- baiknya. (Satria, Rustiadi, & M. Purnomo, 2011)

2.5.1 Lembaga Koperasi

Lembaga koperasi, secara harfiah besarnya lembaga koperasi merupakan sebuah lembaga keuangan yang berazaskan kekeluargaan dan bergotong-royong. Lalu tujuannyapun tidak lain untuk meningkatkan taraf ekonomi anggotanya serta masyarakat sekitar.

Ada 3 hal penting tujuan sebuah lembaga didirikan :

Memaksimumkan Keuntungan, sebuah lembaga harus mampu memaksimalkan keuntungan yg didapat untuk meningkatkan kualitasnya, anggota maupun sekitarnya.

Memaksimalkan Nilai Perusahaan, setelah sebuah lembaga mendapatkan keuntungan maksimal, lembaga itupun harus melaksanakan nilai-nilai yang diemban sejak didirikan.

Meminimalisir Biaya, untuk melaksanakan kedua poin tersebut sebuah lembaga harus mampu memanfaatkan sumber daya yang ada ataupun yang terbatas untuk mengefisienkan pelaksanaannya.

2.6 Aktivitas Perkebunan

Aktivitas Perkebunan yaitu segala kegiatan yang mengupayakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau mediatanam lainnya dalam ekosistem sudah sesuai, mengolah dan memasarkan bareng dan jasa hasil tanaman tersebut, serta bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan dan manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan serta masyarakat. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pertanian, Perkebunan

merupakan segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sarana produksi, sumber daya manusia, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Perkebunan ialah suatu andalan komoditas unggulan seraya menopang pembangunan perekonomian Nasional Indonesia, baik dari sudut pandang pemasukan devisa Negara maupun dari sudut pandang peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, dengan cara membuka lapangan pekerjaan yang sangat terbuka luas. Dalam isi menimbang UU Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan disebutkan bahwa, untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan, maka perkebunan perlu dijamin keberlanjutan serta ditingkatkan fungsi dan peranannya lalu perkebunan sebagai salah satu bentuk pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara terencana, terbuka, terpadu, professional, dan bertanggung jawab.

2.7 Infrastruktur Perdesaan

Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi- fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari- hari masyarakat. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas- fasilitas atau struktur- struktur dasar, peralatan- peralatan, instalasi- instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat, infrastruktur adalah aset fisik yang dirancang dalam sistem sehingga memberikan pelayanan publik yang penting. (Kodoatie, 2005 dalam Grigg, 1988). Adanya infrastruktur yang memadai merupakan prakondisi bagi tumbuh kembangnya kegiatan agrobisnis dan perekonomian secara umum di perdesaan secara umum mencakup sistem pengairan, pasar komoditas pertanian, jalan raya, kelistrikan dan jaringan telekomunikasi. Infrastruktur tersebut merupakan barang publik (public good) atau semi publik (semi public good) sehingga pembangunannya harus diselenggarakan oleh pemerintah bersama dengan masyarakat. (Mardiana, 2018 dalam Hanafie, 2010).

2.7.1 Infrastruktur Jalan Perdesaan

Infrastruktur jalan ialah bagian dari sistem transportasi dimana transportasi adalah pemindahan barang dan/atau manusia dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan sebuah wahana yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Dalam beberapa pengertian, istilah infrastruktur termasuk pula infrastruktur sosial kebutuhan dasar antara lain sekolah dan rumah sakit. Dengan kata lain, infrastruktur jalan perdesaan adalah kebutuhan fisik masyarakat di wilayah perdesaan terhadap sistem struktur jalan baik berupa prasarana jalan (jalan desa/jalan tani, jalan penghubung ke jalan utama menuju desa/kota terdekat, jembatan, dan drainase sebagai kelengkapan jalan) maupun sarana jalan seperti motor, dan angkutan umum.

2.8 Konsep Peran

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Hal tersebut diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, syarat-syarat peran mencakup 3 (tiga) hal, yaitu :

Peran meliputi norma-norma yaitu dihubungkan dari posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini mewujudkan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

Peran ialah bentuk konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peran juga suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi dapat terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat

yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka bisa saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran (*role*). Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan.

2.9 Penelitian Terdahulu

Format Rekapitulasi Review dari Jurnal

No	Judul Artikel	Nama Penulis	Nama Jurnal	Vol (thn)	No	Hal	Metode	Hasil
1.	Pengembangan Agribisnis Kopi Dalam Kerangka Pembangunan Ekonomi Wilayah Di Kabupaten Aceh Tengah (Studi Kasus: Kabupaten Aceh Tengah)	Adi Bilhak, Ma'rif Samsul	Jurnal Teknik PWK	Vol.3, 2014	No 2	254- 261	Metode Analisis Deskriptif	Kesimpulannya ialah Pola pengembangan agribisnis perkebunan kopi di Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan analisis agribisnis hulu, analisis primer dan analisis hilir adalah dengan penempatan input produksi di Kota Takengon, Kecamatan Pegasing, dan Kecamatan Kutepanang yang menyediakan bibit tanaman kopi, pupuk, pestisida serta mesin, dimana suplayer input utama berada di Sumatera Utara. Pengembangan agribisnis primer difokuskan pada kenaikan usaha tani yang dilakukan saat setiap kecamatan/skala kabupaten melawati pengembangan industri pengolahan, penyediaan peralatan dan penyuluhan oleh dinas perkebunan serta pengembangan agribisnis hilir dilakukan dengan pola peningkatan distribusi hasil perkebunan kopi lewat percepatan akses transportasi darat lintas Takengon, Bireun, Sumatera Utara dan lintas Takengon, Aceh Tenggara, Sumatera Utara serta dukungan informasi pasar dengan pengenalan internet kepada pelaku perkebunan kopi.

2.	Pengembangan Agribisnis sebagai Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Perdesaan	Akhmadi, Hermanto Siregar, M Parulian Hutagaol	Jurnal Manajemen & Agribisnis,	Vol.13, November 2016	No 3	240-253	Analisis Double Difference, analisis faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal strategis (analisis IFE-EFE)	Program PUAP memberikan dampak yang bermakna pada kenaikan produksi padi dan pendapatan riil petani PUAP dibandingkan dengan petani non- PUAP. Penelitian ini memberikan alternatif strategi dalam mengurangi kemiskinan di perdesaan.
3.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI WILAYAH BERBASIS PERTANIAN DALAM RANGKA PENGURANGAN KEMISKINAN DI KALIMANTAN BARAT	Nia Permatasari, Dominicus Savio Priyarsono, dan Amzul Rifin	Jurnal Agribisnis Indonesia	Vol 4, Juni 2016	No 1	27-42	Metode Analisis Deskriptif Kuantitatif.	Kesimpulannya adalah terdapat beberapa hal yaitu : kinerja keuangan daerah masih sangat rendah di Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat selama periode 2008-2013. Lalu, share sektor pertanian terhadap PDRB Kalimantan Barat, berpengaruh negative terhadap tingkat kemiskinan. Jumlah penduduk berpengaruh positif dan Pendidikan berpengaruh negative terhadap pengurangan jumlah penduduk miskin. Lalu, secara signifikan kinerja sector pertanian dipengaruhi oleh anggaran pertanian dan tenaga kerja pertanian.
4.	PEMBANGUNAN EKONOMI BERBASIS AGRIBISNIS SEBAGAI WUJUD	Muchamma d Nurif, Sukrianti Mukhtar	Jurnal Sosial Humanior Ah	Vol 3, Novem ber 2010	No 2	124-138	Metode Analisis Deskriptif	strategi pembangunan ekonomi yang berbasis pada pendayagunaan keahlian rakyat banyak (membangun perekonomian yang memiliki <i>local conten</i> -nya

	DARI PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKELANJUTAN							tinggi) dalam bidang Agraris merupakan Pembangunan ekonomi berbasis agribisnis. Pembangunan ini rakyat sebagai subjek (pelaku) ekonomi. Karena sector agribisnis mencakup pertanian dan industri serta jasa boga terkait dengannya. Maka, agribisnis yang dimaksudkan dalam hal ini mengacu pada pertanian agribisnis yang terdiri dari: sub sektor agribisnis hulu yang meliputi pembibitan/pembenihan, agro-otomotif (mesin dan peralatan pertanian), agro-kimia (pupuk, pestisida, obat /vaksin ternak)
5.	KONSEP PENGEMBANGAN WILAYAH BERBASIS AGRIBISNIS DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN PETANI	Nizwar Syafa'at, Pantjar Simatupang, Sudi Mardianto dan Tri Pranadji	FORUM PENELITIAN AGRO EKONOMI.	Volume 21, Juli 2003	No 1	26-43	Metode Analisis Deskriptif, Analisis Pendekatan	Dapat disimpulkan bahwa dengan mengutamakan agribisnis sebagai penggeraknya untuk Strategi pengembangan wilayah, bisa dijadikan pilihan pendekatan pembangunan pedesaan dengan tujuan memberdayakan petani. Maka dari itu strategi ini bukan saja memberikan harapan lebih besar terjadinya transformasi struktur sosial ekonomi di pedesaan melainkan juga akan menempatkan sistem agribisnis sebagai integrator sektor riil antar wilayah (yang homogen). Jika keunggulan komparatif tenaga kerja yang melimpah, nilai intrinsic agroekosistem, teknologi dan

								<p>pengetahuan manajemen bisa dimanfaatkan secara optimal sebagai penggerak riil sistem agribisnis setempat. Pengembangan manajemen usaha, bisa diintegrasikan dengan pemaduan antar wilayah usaha agribisnis. Diterapkannya model agribisnis <i>One Village One Product Movement</i>, sistem koordinasi vertikal relatif mudah disesuaikan dengan tuntutan pasar; melainkan juga upaya pemberdayaan atau pengembangan partisipasi masyarakat pedesaan setempat.</p>
6.	<p>PENUMBUHKEMBANGAN AGRIBISNIS KOPI ARABICA JAVA PREANGER : DARI PANGALENGAN KE PASAR DUNIA (Studi Kasus Di Koperasi Produsen Kopi Margamulya)</p>	<p>Tuti Karyani, Endah Djuwendah, Agriani Hermita Sadeli, Ima Marlina, E.Supriyadi R</p>	<p>Jurnal Agribisnis Terpadu</p>	<p>Juni 2018 Vol. 11</p>	<p>No 1</p>	<p>15-29</p>	<p>Metode deskriptif kualitatif dengan teknis studi kasus</p>	<p>Menurut analisis IFAS-EFAS posisi KPKM ada di sel II adalah Growth and Build artinya untuk penumbuh kembangannya diperlukan strategi Intensif dan Integrasi. Begitupula dari analisis SWOT terdapat 10 strategi utama yang akan mengantarkan KPKM untuk berdaya saing di perkopian dunia.</p>
7.	<p>PERKEMBANGAN PERTANIAN KOPI RAKYAT DI DESA MARGAMULYA KECAMATAN PANGALENGAN TAHUN 1990-2015: DARI TRADISIONAL KE SISTEM AGRIBISNIS</p>	<p>Widiana, Murdiah Winarti, Tarunasena</p>	<p>FACTUM</p>	<p>Volume 6, Oktober 2017</p>	<p>No 2</p>	<p>264-277</p>	<p>metode historis dan metode sejarah.</p>	<p>Desa Margamulya ialah salah satu desa penghasil kopi arabika terbaik di Kec. Pangalengan Kab. Bandung yang mengalami perkembangan cukup signifikan. Perkembangan pertanian kopi rakyat di Desa Margamulya dimulai pada tahun 1998 atau 8 tahun setelah dirintisnya sistem pertanian</p>

									kopi tradisional serta dikenalkannya sistem pertanian baru.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

